



### KONFERENSI PERS PRESIDEN UKRAINA DAN KANSELIR AUSTRIA

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Kanselir Austria Karl Nehammer menghadiri konferensi pers gabungan, saat serangan Rusia ke Ukraina terus berlanjut, di Kyiv, Ukraina, Sabtu (9/4).

# Perdana Menteri Pakistan Imran Khan Akhirnya Digulingkan

Imran Khan telah digulingkan dari kekuasaan setelah kehilangan mosi tidak percaya dalam kepemimpinannya.

**ISLAMABAD(IM)** - Perdana Menteri (PM) Pakistan Imran Khan telah digulingkan dari kekuasaan setelah kehilangan mosi tidak percaya dalam kepemimpinannya. Pemungutan suara diadakan lewat tengah malam setelah partai-partai oposisi mengajukan mosi menentang, yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung.

Imran Khan mengatakan bahwa dirinya tidak akan mengakui pemerintah oposisi. Dia pun mengklaim bahwa ada konspirasi pimpinan AS untuk menyingkirkannya. Majelis sekarang akan menunjuk perdana menteri baru. Parlemen Pakistan akan bertemu untuk memilih pemimpin baru negara itu pada Senin (11/4). PM Pakistan terpilih akan dapat memegang kekuasaan hingga Oktober 2023, ketika pemilihan berikutnya akan diadakan.

Ayaz Sadiq, yang bertanggung jawab atas majelis nasional sementara. Imran Khan menjadi perdana menteri Pakistan pertama yang digulingkan melalui mosi tidak percaya. Mahkamah Agung memutuskan Imran Khan telah bertindak inkonstitusional ketika dia memblokir mosi tidak percaya dan membubarkan parlemen. Hal ini membuat beberapa anggota oposisi marah dan menuduh perdana menteri itu makar.

Beberapa menit sebelum pemungutan suara dimulai, Ketua Majelis Rendah Parlemen Pakistan mengumumkan pengunduran dirinya. Anggota partai Mr Khan (PTI) meninggalkan gedung, bersikeras dia adalah korban konspirasi internasional.

Partai-partai oposisi mampu mengamankan 174 suara di majelis yang beranggotakan 342 orang itu untuk mendukung

mosi tidak percaya, sehingga menjadikannya suara mayoritas. Dalam sebuah tweet, pemimpin oposisi Shehbaz Sharif mengatakan Pakistan dan parlemennya "akhirnya dibebaskan dari krisis serius". "Selamat kepada bangsa Pakistan atas fajar baru," imbuhnya.

Sementara itu, senator PTI Faisal Javed Khan mengatakan pria berusia 69 tahun itu berjalan keluar dari kediaman perdana menteri pada Sabtu (9/4). "dengan anggung dan dia tidak sujud". Dia melanjutkan bahwa Imran Khan telah "mengangkat seluruh bangsa". Mantan kapten tim kriket nasional Pakistan terpilih sebagai perdana menteri pada 2018, dan berjanji untuk memerangi korupsi dan memperbaiki ekonomi. Tetapi janji-janji itu tidak terpenuhi dengan negara yang dicengkeram oleh krisis keuangan.

Pada akhir Maret, serangkaian pembelotan membuatnya kehilangan mayoritas dan membuatnya berjuang untuk karir politiknya. Wartawan BBC Secunder Kermani mengatakan Imran Khan secara luas dianggap telah berkuasa dengan bantuan tentara Pakistan, tetapi

sekarang pengamat mengatakan mereka telah jatuh.

Imran Khan telah berulang kali mengatakan bahwa partai-partai oposisi Pakistan bekerja sama dengan kekuatan asing. Dia juga mengklaim bahwa dia adalah target konspirasi yang dipimpin AS untuk menyingkirkannya karena penolakannya untuk berdiri dengan Washington dalam masalah melawan Rusia dan Tiongkok.

AS telah mengatakan "tidak ada kebenaran" dalam tuduhan ini, dan Imran Khan tidak pernah memberikan bukti apa pun. Dia mengunjungi Moskow untuk bertemu Presiden Vladimir Putin saat Rusia meluncurkan invasi ke Ukraina dan sebelumnya mengkritik apa yang disebut pemerintah Bush sebagai perang melawan teror.

Pemungutan suara hari Sabtu dilakukan setelah anggota parlemen oposisi mengajukan mosi tidak percaya ke parlemen Minggu lalu, dalam upaya untuk menggulingkan Khan dari kekuasaan.

Namun, Wakil Ketua Parlemen Qasim Suri - seorang anggota partai politik Khan

- dengan cepat memblokir pemungutan suara itu, dengan mengatakan itu menunjukkan "campur tangan asing".

Suri juga mengatakan bahwa itu bertentangan dengan konstitusi, yang menyerukan kesetiaan kepada negara.

Pemerintahan Imran Khan kemudian membubarkan parlemen dan menyerukan pemilihan cepat diadakan. Hal ini membuat marah beberapa anggota oposisi, dengan beberapa menuduh perdana menteri melakukan pengkhianatan karena menghalangi pemungutan suara.

Tokoh oposisi mengajukan petisi ke Mahkamah Agung untuk menilai situasi.

Pada hari Kamis, pengadilan tinggi Pakistan memutuskan bahwa keputusan Khan untuk menghentikan pemungutan suara adalah tidak konstitusional. Ini memerintahkan bahwa mosi tidak percaya harus dilanjutkan lagi. Namun, keputusannya atas pemungutan suara berlanjut hingga Sabtu malam, mendorong ketua majelis rendah parlemen - Asad Qaiser, sekutu Khan - untuk mengundurkan diri. ● tom

## Ukraina Larang Semua Impor dari Rusia

**MELBOURNE(IM)** - Ukraina melarang semua impor dari Rusia dan menyerukan kepada negara-negara lain untuk mengikuti langkahnya dengan memberlakukan sanksi ekonomi yang lebih keras lagi terhadap Moskow. "Hari ini secara resmi kami mengumumkan penghentian sepenuhnya perdagangan barang-barang dengan negara agresor," tulis Menteri Perekonomian Ukraina, Yulia Svyrydenko, di laman Facebook miliknya, Sabtu.

"Mulai saat ini, tidak akan ada lagi produk dari Federasi Rusia yang diimpor ke wilayah negara kami," katanya.

Rusia adalah salah satu mitra dagang utama Ukraina sebelum perang dengan nilai tahunan sekitar 6 miliar dolar AS (Rp86,22 triliun).

Sejak awal invasi Rusia di Ukraina pada 24 Februari, pertukaran barang dan jasa antara kedua negara bertetangga itu hampir nihil, dan pengumuman pada Sabtu menegaskan kebijakan tersebut menjadi sebuah ketentuan hukum. "Musuh ini tidak akan bisa lagi menerima dana dari kami karena kami akan terus mengurangi semua potensi yang ada bagi mereka untuk membiayai perang," kata Svyrydenko.

"Langkah ini bisa dicontoh oleh mitra Barat kami dan mendorong mereka untuk memperkuat sanksi terhadap Rusia, termasuk penerapan embargo energi dan isolasi terhadap semua bank Rusia," katanya.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, berulang kali menyerukan Barat untuk memboikot ekspor minyak dan lainnya dari Rusia dan menghentikan semua ekspor ke Rusia sebagai balasan atas invasi militernya.

Negara-negara Barat telah memberlakukan sejumlah langkah untuk mengisolasi Rusia pada tingkat yang belum pernah dialami negara sebesar itu. Sementara itu pada Sabtu Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan akan menjatuhkan lebih banyak

sanksi pada Rusia.

Sementara itu, memasuki bulan ketiga invasi Rusia atas Ukraina, peperangan masih meningkat. Ukraina siap untuk melakukan pertempuran sengit dengan pasukan Rusia yang berkumpul di timur negara itu. Pasukan Rusia telah menarik diri dari wilayah di sekitar Kiev untuk fokus membangun strategi baru di Ukraina timur.

"Ini akan menjadi pertempuran yang sulit, kami percaya pada pertahanan ini dan kemenangan kami. Kami siap untuk berjuang secara bersamaan dan mencari cara diplomatik untuk mengakhiri perang ini," kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.

Negosiator Ukraina, Mykhailo Podolyak, mengatakan Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan bertemu hingga pasukan Ukraina mengalahkan Rusia di wilayah timur. Kemenangan ini akan memperkuat posisi Ukraina dalam negosiasi.

"Kami membayar harga yang sangat tinggi. Tetapi Rusia harus menyingkirkan ilusi kekaisarannya," ujar Podolyak, menurut kantor berita Interfax Ukraina.

Sirene serangan udara terdengar di kota-kota di timur Ukraina, yang telah menjadi fokus aksi militer Rusia setelah menarik diri dari sekitar Kiev. Pejabat Ukraina telah mendeak warga sipil di wilayah timur untuk melarikan diri.

Pada Jumat (8/4) para pejabat mengatakan, lebih dari 50 orang tewas dalam serangan rudal di sebuah stasiun kereta api di kota Kramatorsk di wilayah Donetsk.

Rusia mulai melancarkan operasi militer khusus di Ukraina pada 24 Februari. Operasi militer ini telah memaksa jutaan warga Ukraina melarikan diri dan mengungsi ke Eropa. Beberapa kota yang menjadi medan perang telah berubah menjadi kota mati dengan puing-puing bangunan yang berserakan. ● gul

## Menhan Norwegia Mundur Terkait Skandal Seks

**NORWEGIA(IM)** - Pemerintah Norwegia mengumumkan bahwa Menteri Pertahanan (Menhan) Odd Roger Enoksen mengundurkan diri menyusul perselingkuhannya bersama seorang wanita yang jauh lebih muda.

"Ini adalah keputusan yang diperlukan, setelah apa yang muncul dalam masalah ini," kata Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store, Sabtu (9/4).

Sementara itu, Menhan Enoksen menyampaikan permohonan maaf atas skandal seksnya tersebut kepada publik. "Saya telah membuat beberapa pilihan dan penilaian yang buruk, dan akan memberikan permintaan maaf tanpa pamrih atas kenyataan bahwa tindakan saya telah membuat hidup lebih sulit bagi orang lain," kata Enoksen kepada Kantor Berita NTB.

Enoksen memulai perselingkuhannya pada tahun 2005 ketika pasangannya masih seorang siswa sekolah menengah berusia 18 tahun, menurut surat kabar harian VG. Kelasnya melakukan perjalanan sekolah ke parlemen Norwegia di ibu kota Oslo dan bertemu dengan politisi Partai Tengah, yang saat itu berusia 50 tahun.

Setelah perjalanan sekolah, perempuan tersebut bersama Enoksen memulai apa yang akan menjadi hubungan yang sangat dekat dan seksual, tulis VG. Wanita itu, yang sekarang berusia sekitar 30 tahun itu merinci hubungan mereka kepada surat kabar itu, dengan mengatakan bahwa dirinya merasa terpesona oleh Enoksen karena minatnya pada politik.

Menurut dia, mereka bertemu setidaknya 12 kali di kantornya antara akhir 2006 dan 2007 ketika dia menjadi menteri energi, dengan beberapa pertemuan melibatkan tindakan seksual.

Sementara itu, Enoksen mengkonfirmasi kepada VG bahwa dia telah mengunjunginya di kantornya dan mengatakan mungkin ada beberapa pembicaraan yang bersifat cabul, dia menyangkal ada aspek fisik.

Dia malah mengklaim mereka tidak menjadi intim sampai setelah dia meninggalkan pemerintah pada tahun 2007, dan menekankan bahwa hubungan itu bukan "di mana saya berada dalam posisi berkuasa atas dia".

PM Store mengatakan kepada wartawan bahwa Enoksen belum memberitahunya tentang perselingkuhan itu sebelum dia diangkat menjadi menteri pertahanan setelah pemilihan umum tahun lalu.

Store akan segera menunjuk menteri pertahanan baru sesegera mungkin. Baca juga: Miliarder Ini Dituduh Miliki 5.000 Wanita Simpanan, Dituntut Ganti Rugi Rp11 Triliun. ● ans



### UNJUK RASA WARGA SRI LANKA

Pengunjuk rasa meneriakkan slogan protes terhadap Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa di dekat Sekretariat Kepresidenan, di tengah krisis ekonomi yang melanda negeri tersebut, di Colombo, Sri Lanka, Sabtu (9/4).

## Putin Tunjuk Komandan Perang Baru di Ukraina

**MOSKOW(IM)** - Presiden Rusia, Vladimir Putin telah menunjuk Jenderal Alexander Dvornikov sebagai komandan perang baru Rusia di Ukraina. Dvornikov merupakan jenderal berpengalaman yang sebelumnya memimpin pasukan Rusia di Suriah. Kehadiran Dvornikov di Ukraina nanti diyakini bakal membuat tentara Rusia menjadi lebih kejam.

"Moskow telah menunjuk jenderal baru dengan rekam jejak yang cukup biadab di Suriah, untuk mencoba setidaknya mendapatkan beberapa wilayah di Donetsk yang dihidarkan Putin sebagai kemenangan," tuturnya kepada Sky News, Minggu (10/4).

Pergantian komandan perang ini terjadi setelah Rusia memutuskan mengatur ulang fokus penyerangannya ke bagian timur dan selatan Ukraina.

Putin sebelumnya dilaporkan menargetkan sudah menguasai Donetsk dan timur Ukraina pada 9 Mei mendatang. Saat itu merupakan libur nasional Rusia, untuk memperingati ke-

menangan Uni Soviet dari Nazi di Perang Dunia III.

Dvornikov yang berusia 60 tahun itu merupakan komandan pertama Rusia pada operasi militer di Suriah, setelah Putin mengirim pasukan pada September 2015 untuk mendukung Presiden Suriah, Bashar Al-Assad.

Selama kepemimpinan Dvornikov di Suriah pada September 2015 hingga Juni 2016, pesawat Rusia mendukung rezim Assad dan sekutunya saat menghajar Kota Aleppo, yang menjadi tempat para pemberontak.

Mereka berulang kali membombardir lingkungan padat penduduk dan menyebabkan korban sipil yang besar. Kota itu akhirnya jatuh ke tangan pasukan pemerintah Suriah pada Desember 2016.

Strategi yang nyaris sama juga dilakukan Rusia di beberapa bagian Ukraina. Yakni menyerang gedung berpenduduk di kota besar dan menghancurkan kota Pelabuhan Ukraina, Mariupol. ● gul

## Filipina-Tiongkok Sepakat Jaga Stabilitas di Laut China Selatan

**MANILA(IM)** - Presiden Filipina Rodrigo Duterte melakukan percakapan via telepon dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada Sabtu (9/4).

Pada kesempatan itu, mereka sepakat menjaga perdamaian di Laut China Selatan (LCS).

"Para pemimpin menekankan perlunya mengerahkan semua upaya untuk menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas di LCS dengan menahan diri, meredakan ketegangan serta bekerja pada kerangka kerja yang disepakati bersama untuk kerja sama fungsional," kata kantor presiden Filipina dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (9/4).

Menurut kantor kepresidenan Filipina, meskipun terdapat perselisihan, mereka dan Tiongkok berkomitmen memperluas ruang untuk keterlibatan positif. Dalam percakapan via telepon tersebut, Duterte dan Xi menekankan tentang perlunya melanjutkan diskusi serta menyimpulkan code of conduct di LCS.

Pada November tahun lalu, Filipina kembali terlibat ketegangan dengan Tiongkok di LCS. Kala itu, dua kapal pemasok makanan untuk tentara Filipina, ditembak menggunakan meriam air oleh tiga kapal penjaga pantai Tiongkok

di wilayah Ren'ai Jiao di LCS. Filipina menyebut wilayah itu dengan nama Kulumpol ng Ayungin, yang merupakan atol di Kepulauan Sparty di LCS.

Menurut Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jr, tidak ada yang terluka dalam insiden tersebut. Namun dua kapal pemasok makanan untuk tentara negaranya itu akhirnya membatalkan misinya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian menyebut, penembakan terhadap dua kapal Filipina itu sudah tepat.

"Dua kapal Filipina melewati perairan dekat Ren'ai Jiao di wilayah Tiongkok tanpa izin, lalu kapal penjaga pantai Tiongkok menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum untuk menjaga kedaulatan Tiongkok serta tata tertib di lautan," ujarnya pada 18 November tahun lalu.

Dia mengklaim situasi di dekat Ren'ai Jiao tetap damai. "Tiongkok dan Filipina sedang menegosiasikan masalah tersebut," kata Zhao.

Tiongkok diketahui mengklaim sebagian besar LCS sebagai bagian dari teritorialnya. Klaim tersebut ditentang sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Amerika Serikat (AS). ● ans



### UNJUK RASA AKTIVIS IKLIM DI LONDON

Seorang pria dari Extinction Rebellion mengangkat bendera saat aktivis iklim mengambil bagian dalam demonstrasi di Oxford Circus di London, Inggris, Sabtu (9/4).

## Iran Jatuhkan Sanksi Terhadap 24 Pejabat AS Atas Tuduhan Pelanggaran HAM

**TEHERAN(IM)** - Iran menjatuhkan sanksi terhadap 24 pejabat Amerika Serikat (AS), yang terlibat dalam kampanye "tekanan maksimum" pemerintahan Presiden Donald Trump dan pembunuhan terhadap Jenderal Qassem Soleimani. Langkah ini memunculkan kekhawatiran akan keberlanjutan pembicaraan perjanjian program nuklir yang saat ini tengah menemui keputusasaan.

Hampir 100 warga AS telah diberi sanksi oleh Iran sejak pemerintah AS menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran, memberlakukan sanksi keras terhadap Teheran, dan membunuh Jenderal Iran Qassem Soleimani di Irak.

Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan kelompok baru yang dijatuhkan sanksi mencakup mantan Kepala Staf Angkatan Darat AS George W. Casey Jr, mantan kepala Komando Pusat AS Joseph Votel, dan mantan pengacara Trump Rudy Giuliani. Mereka dimasukkan dalam daftar hitam Iran karena "terlibat dalam aksi terorisme, mengagungkan dan mendukung terorisisme dan pelanggaran berat hak asasi manusia".

Kegiatan teroris yang dirujuk hampir pasti merupakan kiasan terhadap dugaan keterlibatan mantan pejabat tinggi AS dalam pembunuhan Soleimani melalui serangan drone di Irak, demikian diwartakan Sputnik.

Pejabat AS lainnya menghadapi sanksi Iran karena dugaan pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) terkait apa yang disebut kampanye sanksi "tekanan maksimum" yang menghancurkan ekonomi Iran. Mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada 2019 mengakui bahwa rezim sanksi itu dirancang untuk mendorong rakyat Iran "mengubah pemerintahan".

Pompeo sendiri sebelumnya dikenai sanksi Iran pada Januari 2021 yang juga termasuk larangan perjalanan ke negara itu dan pembekuan aset potensial apa pun di Iran.

Media Barat sebagian besar menggambarkan langkah Iran sebagai "simbolis", tetapi diumumkan di saat yang penting. Negosiasi yang bertujuan memulihkan kesepakatan nuklir Iran, atau Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), telah terhenti dalam beberapa pekan terakhir karena penolakan Presiden AS Joe Biden untuk menghapus sanksi terhadap Korps Garda Revolusi Iran (IRGC).

Hal ini telah lama menjadi garis merah bagi Iran, dengan mantan Menteri Luar Negeri Sayyid Kamal Kharrazi menjelaskan di Forum Doha pada akhir Maret, "tentara nasional tidak dapat terdaftar sebagai kelompok teroris." ● gul